



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

12. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rncangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 – 2026 melalui beberapa tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis;
- b. penyusunan rancangan awal Rencana Strategis;
- c. penyusunan rancangan Rencana Strategis;
- d. perumusan rancangan akhir Rencana Strategis;
- e. Penetapan Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah. Maka RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Adapun keterkaitan dokumen Rencana Strategis dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar , yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagaimana ketentuan Peraturan Wali Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Perubahan Ketiga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
- b. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- c. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - h. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - m. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6402);
- p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Ferifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - y. Surat Edaran Sekfeteris Jenderal Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT T.A.2023, DBH DR T.A.2023, dan DAK T.A.2023
 - z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 - aa. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

- bb. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
- cc. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)
- dd. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- ee. Peraturan Wali Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah untuk melakukan penyesuaian atas sub kegiatan, kegiatan, dan sasaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di bidang urusan administrasi kependudukan
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang administrasi kependudukan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar setiap tahunnya

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan dasar yaitu ketentuan – ketentuan yang melandasi , merupakan langkah untuk membatasi pembahasan dan sistematik penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PD Berisi Struktur Organisasi tentang kondisi riil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar meliputi :
	1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2. Sumber Daya SKPD 3. Kinerja Pelayanan SKPD 4. Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten /Kota 4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis 5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 2. Strategi dan Kebijakan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah pada lima tahun mendatang
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Urusan Administrasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Administrasi Kependudukan dan

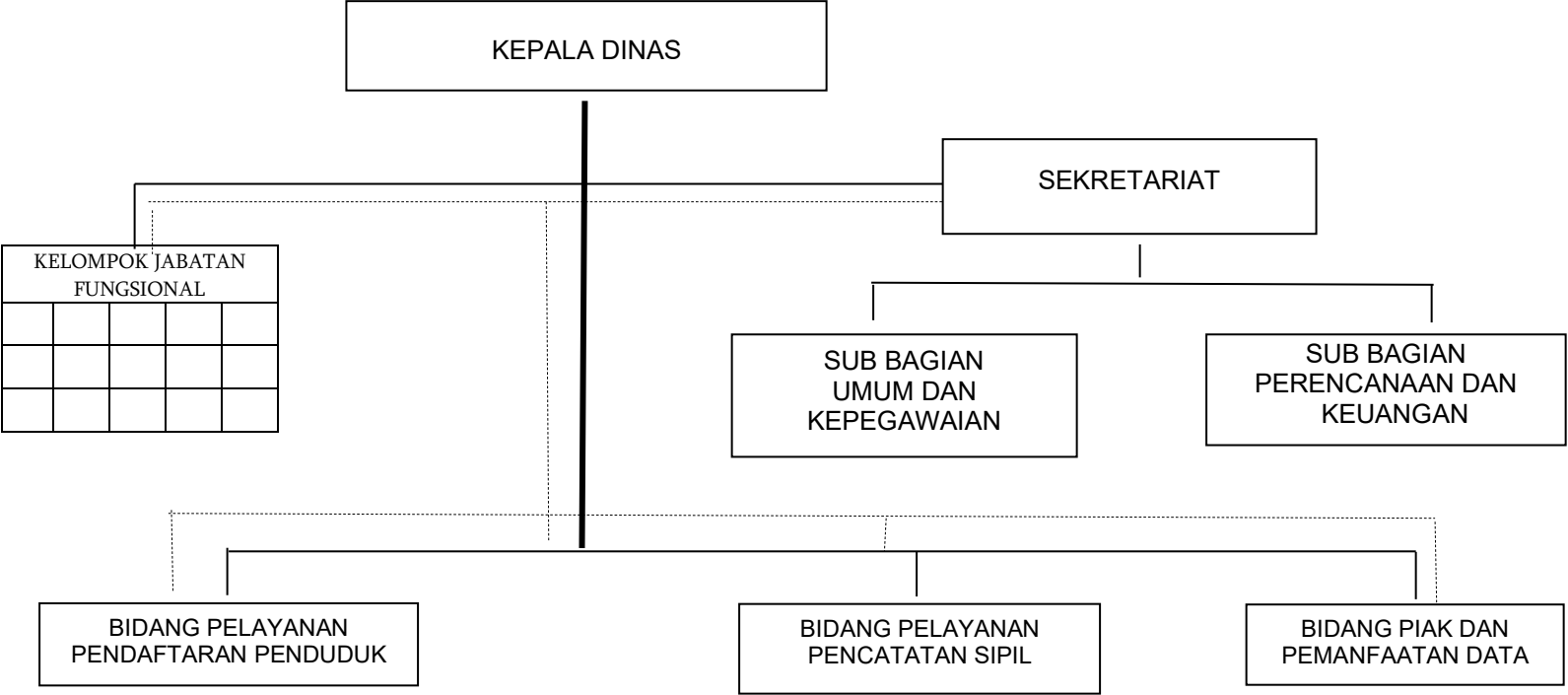
Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan , Sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya .

1. Keadaan Pegawai , sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	Pasca Sarjana (S-2)	2 orang	- orang
2	Sarjana (S-1)	4 orang	9 orang
3	Diploma (D-3)	2 orang	2 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7 orang	1 orang
5	Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)	0 orang	0 orang
	Jumlah	13 orang	12 Orang

Sumber: Dispendukcapil, 2023

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan /Ruang	Jumlah	
		L	P
1	IV / b	1 orang	- orang
3	IV / a	1 orang	1 orang
4	III / d	3 orang	4 orang
5	III / c	- orang	- orang
6	III / b	- orang	4 orang
7	III / a	2 orang	2 orang
8	II / d	6 orang	1 orang
9	II / c	2 orang	- orang
10	II / b	1 orang	- orang
11	II /a	- orang	- orang
12	I/ d	- orang	- orang
13	Kontrak	- orang	- orang
	Jumlah	15 orang	12 orang

Sumber: Dispendukcapil, 2023

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non

struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	
		L	P
1	Struktural	5 orang	5 Orang
2	Non Struktural	10 orang	7 Orang
	Jumlah	13 orang	12 Orang

Sumber: Dispendukcapil, 2023

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah	
		L	P
a.	Diklat Kepemimpinan		
	1) Diklat PIM II	- orang	- orang
	2) Diklat PIM Tk. III	3 orang	1 orang
	3) Diklat PIM Tk. IV	2 orang	5 orang
	4) SPAMA	1 orang	1 orang
	5) ADUMLA	- orang	
	6) ADUM	- orang	

Sumber: Dispendukcapil, 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar telah dilengkapi sarana dan prasarana meskipun belum memadai yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsinya .Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini , seperti tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah		
2.	Bangunan gedung 2 lantai	9 ruangan	1 ruang kepala
			1 ruang Sekretaris
			3 ruang Kabid
			1 ruang arsip
			1 ruang pertemuan
			1 ruang pelayanan
			1 ruang server

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3 (tiga) buah	- Kijang warna biru AG. 421 PP
			- Kijang Innova warna hitam AG 584 PP
			- Suzuki Carry AG 375 PP
4.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	6 (Enam) buah	- Suzuki AG 2652 PP
			- Suzuki AG 2653 PP
			- Honda Legenda No. Pol
			AG. 9825 HA Th. 2006
			- Honda Legenda No. Pol.
			AG.9849HB Th. 2006
			- Honda Legenda No.Pol.AG 9807 HB
			- Honda Legenda No.Pol.AG 9863 HB
5.	Meja 1 biro	6 (enam) buah	Untuk eselon II dan III (kayu)
6.	Meja ½ biro	20 buah	Kayu
7.	Kursi putar	5 (lima) buah	Besi
8.	Kursi tamu	1 (satu) set	Besi spon (ruang kepala)
9.	Kipas angin	3 (tiga) buah	Besi
10.	Pesawat telepon	2 (dua) buah	Merk Tens plastic
11.	Brankas	1 (satu) buah	Besi
12.	Almari panjang	3 (tiga) buah	Kayu
13.	Jam dinding	3 (tiga) buah	Plastik
14.	Tape recorder	1 (satu) buah	Merk Compo Politron
15.	Mesin ketik	4 (empat) buah	- Olympia 1 buah
			- TA. Royal 1 buah
			- Gandaran 2 buah
16.	Almari sedang	3 (tiga) buah	Kayu
17.	Dispenser	2 (dua) buah	Plastik
18.	Papan Struktur Organisasi	1 (satu) buah	Melamin
19.	Papan Tupooksi Dinas	1 (satu) buah	Melamin
20.	Papan Data	1 (satu) buah	Melamin
21.	Papan Pengumuman	2 (dua) buah	Melamin
22.	Komputer	5 (dua) unit	Logam
23.	TV	1 (satu) unit	Logam
24.	Filing Kabinet	8 (delapan)buah	Besi
25.	Kodak	1 (satu) buah	Rusak
26.	AC	3 (tiga) unit	Logam
27.	Warles	1 (satu) unit	Logam
28.	Almari Arsip	6 (enam) unit	Kayu
29.	Rak Arsip	10 (sepuluh) buah	Besi
30.	Kursi Kerja	28 buah	Kayu / Spon
31.	Kursi Rapat	38 buah	Kayu / Menjalin
32.	Kursi tamu panjang	1 set (4 buah)	Plastik
33.	Kursi Plastik	10 buah	Plastik
34.	Kursi Bunder Pengunjung	5 buah	Kayu
35.	Rak Piring	1 buah	Kayu

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
36.	Piring Besar	3 dosen	Kaca
37.	Piring Kecil	3 dosen	Kaca
38.	Gelas	3 dosen	Kaca
39.	Panci	2 buah	Aluminium
40.	Sendok	3 dosen	Stainlestell
41	Faximile	1 buah	Logam
42	Laptop	3 buah	Logam
43	Server	1 unit	Logam
44	Printer	6 buah	Logam
45	Scaner	1 buah	Logam

Sumber: Dispendukcapil, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disamping sumber daya manusia , sarana dan prasarana juga didukung oleh dana.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indikator Tujuan																		
a.	Survey Kepuasan Masyarakat				Baik 78	Baik 79	Baik 80	Baik 81	Baik 82	Baik 79,5	Baik 78,41	Baik 82,96	Baik 83,02		101,92	99,25	103,70	102,4	
2.	Indikator sasaran																		
a.	Presentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (IKU)				87	89	-	-	-	93,68	96,05	96,70	97,02	-	107,67	107,92	-	-	-
b	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan				-	-	90	91	92	-	-	93,59	94,80	-	-	-	103,9	104,17	-
	- Persentase capaian kepemilikan KTP									95,76	98,3	98,81	99,27						
	- Persentase capaian penerbitan KK									100	100	100	100						
	- Persentase capaian penerbitan surat pindah									99	100	100	100						
	- Persentase capaian kepemilikan KIA									69	77,96	80,22	91,15						
c	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil				-	-	90	91	92	-	-	98,85	99,25	-	-	-	109,83	109,06	-
	- Persentase capaian kepemilikan akta kelahiran (usia 0 -18 th)									86,65	92,14	94,54	97,02						
	- Persentase capaian penerbitan akta perceraian									100	100	100	100						
	- Persentase capaian penerbitan akta kematian									99	100	100	100						

[illegible]

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	- Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil				87	89	90	91	92	88,14	98	109,84	99,25		101,3	110,1	122	109,06	
c	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
	- Prosentase Validitas data kependuudkan				87	89	90	91	92	98	99,6	110,7	99,98		112,6	111,9	121.6	109.86	
d	Program Profile Kependudukan																		
	- Prosentase profile kependudukan Kota Blitar				100	-			100	100					100				

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Dari tabel, dapat dilihat indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

- 1) Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (kepemilikan dokumen KK, KTP el, KIA)
- 2) Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (kepemilikan dokumen akta kelahiran , akte kematian, akte perkawinan dan akte perceraian)
- 3) Persentase data kependudukan yang valid
- 4) Persentase peningkatan validitas data kependudukan

Dari indikator kinerja tersebut sampai dengan tahun 2020 pada dasarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun untuk capaian kepemilikan KIA masih rendah yakni 79,70 % dari target 100%. Hal ini disebabkan anak usia 15 dan 16 tahun kurang berminat untuk mengurus KIA dikarenakan bagi yang usia 16 tahun sudah melakukan perekaman KTP el sehingga yang bersangkutan menunggu jadinya atau cetak KTP el.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode Renstra 2016-2020 dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran sebagaimana table berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar Tahun 2016 – 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.160.000	-	-	-	-	2.336.980	-	-	-	-	74%			-	-	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.209.200	217.000.000	238.200.000	-	-	112.514.022	195.713.377	206.217.021	-	-	55%	90%	87%	-	-	8%	35%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.387.200	12.923.400	16.500.000	-	-	18.775.200	12.923.400	16.500.000	-	-	97%	100%	100%	-	-	-8%	-6%
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	22.278.650	15.000.000	10.781.000	-	-	22.099.650	14.904.000	10.781.000	-	-	99%	99%	100%	-	-	-30%	-30%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.336.450	3.600.000	4.000.000	-	-	3.336.450	3.600.000	4.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	-	9%	9%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.080.100	6.899.600	7.954.530	-	-	6.080.100	6.899.600	7.881.830	-	-	100%	100%	99%	-	-	14%	14%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	6.120.000	7.200.000	-	-	7.200.000	6.120.000	7.200.000	-	-	100%	100%	100%	-	-	0%	0%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.240.000	7.560.000	21.328.400	-	-	4.240.000	7.560.000	21.328.400	-	-	100%	100%	100%	-	-	124%	124%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	146.551.300	158.213.500	204.739.150	289.947.600,00	80.000.000	146.267.923	158.204.027	204.738.615	289.264.496	79.999.671	100%	100%	100%	99,8%	100%	18%	18%
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	-	-	-	58.270.400	62.956.400	-	-	-	57.232.600	61.944.850	-	-	-	98,2%	98%	8%	8%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	-	-	-	76.400.000	116.320.000	-	-	-	19.991.500	112.184.750	-	-	-	26,2%	96%	52%	461%

[illegible]

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional	74.000.000	74.000.000	50.000.000	-		67.870.000	67.870.000	50.000.000	-		92%	92%	100%	-	-	-18%	-14%
	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	-	10.000.000	10.000.000	-		-	10.000.000	10.000.000	-			100%	100%	-	-	0	0
	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	-	-	-	83.000.000	21.175.000	-	-	-	82.500.000	20.500.000	-	-	-	99%	-	-74%	-75%
	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	-	-	-	9.500.000	70.120.000	-	-	-	9.155.000	67.070.200	-	-	-	96%	-	638%	633%
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	29.440.500	9.614.000	536.400	-		25.359.500	9.614.000	536.400	-	-	86%	100%	-	-	-	-87%	-85%
	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	-	10.000.000	2.299.400	-		-	9.802.000	2.299.400	-	-		98%	-	-	-	-77%	-77%
	Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1.250.000	1.245.200	-	-	-	1.250.000	1.245.000	-	-	-	100%	99,98 %	0%	0%
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		-															
	Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara	125.867.600	-	-	-	-	109.001.320	-	-	-	-	87%	-	-	-	-	0	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Terpadu																	
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	648.990.110	-	-	-	-	489.322.908	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	0	0
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	2.295.000	-	-	-	-	2.295.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0	0
	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	199.940.250	-	-	-	-	196.064.869	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	0	0
	Pengembangan Database Kependudukan	46.766.050	-	-	-	-	42.487.850	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	0	0
	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	212.140.700	-	-	-	-	208.569.500	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	0	0
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	97.002.000	-	-	-	-	87.840.298	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK																	
	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	-	322.788.000	-			-	319.694.920	-	-	-	-	99%	-	-	-	0	0
	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	192.925.100	201.513.000			-	185.006.000	191.392.000	-	-	-	96%	95,0%	-	-	4%	3%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Mobiling	-	404.262.200	636.450.500			-	372.999.094	548.702.722	-	-	-	92%	86,2%	-	-	57%	47%
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dokumen	-	8.450.000	7.250.000			-	3.639.000	3.263.500	-	-	-	43%	45,0%	-	-	-14%	-10%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pendaftaran Penduduk																	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	198.916.100	391.006.600			-	160.928.720	375.701.019	-	-	-	81%	96,1%	-	-	97%	133%
	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	-	-	-	245.470.000	144.793.600	-	-	-	193.029.200	130.666.400	-	-	-	78,6%	53,2%	-41%	-32%
	Pelayanan identitas Penduduk	-	-	-	324.412.154	344.348.304	-	-	-	305.283.000	317.486.300	-	-	-	94,1%	97,9%	6%	4%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	-	-	-	300.000.000	278.776.372	-	-	-	296.344.868	259.006.195	-	-	-	98,8%	86,3%	-7%	-13%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL																	
	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Pengesahan Dan Pengakuan Anak	-	55.825.800	81.866.200	57.016.700		-	53.818.420	80.895.478	53.976.100		-	96%	98,8%	94,7%	-		
	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan dan Perceraian	-	26.452.000	4.850.000	-		-	26.380.000	4.850.000	-		-	100%	100,0 %		-	-82%	-82%
	Pengelolaan Arsip Akta Pencatatan Sipil	-	50.096.700	44.881.600	-		-	48.673.000	43.761.875	-		-	97%	97,5%		-	-10%	-10%
	Legalisasi Dokumen Akta Pencatatn Sipil	-	10.000.400	8.123.300	-		-	8.394.200	7.883.500	-		-	84%	97,0%		-	-19%	-6%
	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran , Kematian dan Perubahan Nama	-	-	-	57.016.700	71.652.200	-	-	-	53.976.100	59.429.700	-	-	-	94,7%	104,2 %	26%	10%
	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinaan, Perceraian, Pengakuan Dan , Pengesahan	-	-	-	35.767.700	39.365.300	-	-	-	28.036.100	33.335.700	-	-	-	78,4%	93,2%	10%	19%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Dan Pengangkatan Anak																	
	Pelayanan Pencatatan Sipil (DAK)	-	-	-	100.000.000	99.999.000	-	-	-	95.948.917	99.842.641	-	-	-	95,9%	99,8%	0%	4%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																	
	Sosialisai Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)	-	142.300.000	-	-		-	141.975.000	-	-	-	-	99,8%	-	-	-	0	0
	Sosialisai Kebijakan Kependudukan	-	144.001.900	234.007.650	-		-	142.931.300	225.990.150	-	-	-	99%	96,6%	-	-	63%	58%
	Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	-	71.800.000	664.775.872	-		-	69.899.100	661.850.050	-	-	-	97%	99,6%	-	-	826%	847%
	Peningkatan Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	-	-	-	199.784.000	78.510.500	-	-	-	198.919.100	76.229.800	-	-	-	99,6%	91,7%	-61%	-36%
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	-	-	-	118.400.000	118.400.000	-	-	-	116.054.600	107.402.600	-	-	-	98,0%	90,7%	0%	-7%
	Pengelolaan Informasi Dan Data Kependudukan	-	-	-	306.491.200	594.039.500	-	-	-	304.389.900	590.704.400	-	-	-	99,3%	99,4%	94%	94%
	PROGRAM PROFILE KEPENDUDUKAN																	
	Penyusunan Profile Kependudukan Kota	-	90.997.100	123.704.700	-		-	90.640.604	123.088.140	-	-	-	100%	99,5%	-	-	36%	36%
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-	95.940.000	345.234.400	0	271.335.000	-	95.177.000	344.352.100	0	270.648.412	-	99%	99,7%	-	-	41%	42%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(DAK)																	
	Udating Data NIK Penduduk Tingkat RT/RW se Kota Blitar	-	24.879.000	107.250.000	-		-	24.228.400	105.025.200	-	-	-	97%	98%	-	-	331%	333%

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Dari tabel anggaran serta realisasi anggaran dapat terlihat capaian anggaran yang masih kurang pada periode renstra tahun 2016 – 2020 yaitu

1. Pada tahun pertama untuk kegiatan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operational dengan anggaran 6.259.600 terealisasi 3.057.600 dengan capaian realisasi 48,85%. Capaian masih rendah dikarenakan pada saat perencanaan penganggaran diberikan kelonggaran anggaran untuk mengantisipasi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Selain itu ada 3 motor yang belum dibayarkan pajak tahunannya hal ini dikarenakan masih kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana
2. Pada tahun kedua dan ketiga kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar 7.250.000 terealisasi 3.263.500 dengan capaian realisasi 45,01. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dikarenakan keterbatasan SDM.
3. Pada tahun keempat Kegiatan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dengan anggaran sebesar 245.470.000 terealisasi 193.029.200 dengan capaian realisasi 78,64%. Hal ini disebabkan selain adanya efiseinsi dari pengadaan brang/jasa juga dikarenakan untuk realisasi pengiriman paket dokumen adminduk kepada masyarakat target di DPA sebanyak 10.000 dokumen. Sedangkan relaisasi sesuai dengan permohonan pelayanan yang masuk hanya 6.125 dokumen dengan silpa anggaran sebesar 24.875.000

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Selain itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan memiliki kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan pengelolaan data Kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa Tantangan menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Pola pikir masyarakat dalam mensikapi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin kritis dan berasal dari berbagai kepentingan yang berbeda , serta semakin ketatnya kontrol masyarakat baik yang dilakukan secara langsung maupun lewat wakil – wakilnya diLegislatif.
- b. Menurunnya kadar kepercayaan kepada pemerintah oleh masyarakat harus disikapi dengan kerja keras serta bukti nyata , dengan terus menerus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi – inovasi pelayanan.

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
- d. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam memberikan layanan adminduk adalah sebagai berikut :

- a) Kewenangan dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semakin kuat dan jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b) Sinergitas pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c) Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan;
- d) Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih efektif dan efisien;
- e) Data Kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dijadikan sumber utama data kependudukan dan menjadi rujukan semua instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat di wilayah Kota Blitar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis organisasi perangkat daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa 5 (lima) tahun mendatang.

3.1. 1identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar merupakan unsur pelayanan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan terutama yang berkaitan dengan aspek pokok kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaraan Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan yang lebih mendekatkan pada masyarakat	Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan online
			Kurangnya perangkat ADM untuk memberikan layanan cetak mandiri bagi masyarakat Kota Blitar
2	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya tata kelola arsip pencatatan sipil.	Belum adanya tenaga arsiparis dalam pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Belum optimalnya pengelolaan berkas/dokumen arsip pencatatan sipil

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurang update data perkembangan penduduk	Belum adanya pemadanan data terintegrasi dengan lembaga terkait

Sumber: Dispendukcapil, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan program Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Penjelasan Visi dan Misi tersebut yaitu :

KOTA BLITAR KEREN : Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas Keberagaman tetap dalam kondisi RELigius dan Nasionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.

UNGGUL : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai-nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan menghadapi Revolusi Industri

MAKMUR : Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

BERMARTABAT : Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Adminduk.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tersebut adalah pada misi 5 (lima) yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keperintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Intervensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah pada capaian indikator sasaran prosentase SKPD dengan survey kepuasan masyarakat bidang kependudukan dan pencatatan sipil Baik.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	m optimalnya pelayanan yang lebih mendekatkan pada masyarakat	- Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan online - Kurangnya perangkat ADM untuk memberikan layanan cetak mandiri bagi masyarakat Kota Blitar	Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan sarana pendukung inovasi pelayanan (SIPAK Mandiri) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan adminduk secara daring serta mengoptimalkan sosialisasi terkait pelayanan adminduk daring melalui berbagai media yakni media sosial, elektronik dan media cetak

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Terjaminnya hak – hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dengan sasaran stratgis: Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yakni dokumen KIA dan Akte kelahiran seluruh warga Kota Blitar	Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 79 tahun 2020 tentang penghentian sementara pengenaan denda administrasi atas laporan kependudukan dan pencatatan sipil sehingga akan mendorong warga diatas 18 tahun yang belum mempuntai akte	Belum optimalnya sosilisasi kebijakan pelayanan adminduk kepada masyarakat

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	pencatatan sipil		kelahiran untuk segera mengurusnya.	
2.	Tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan sasaran jumlah Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan oleh Lembaga/OPD / Badan Hukum	Adanya kebutuhan data kependudukan dalam mempermudah pemberian layanan public sehingga mendorong Lembaga/OPD untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan Lembaga/OPD dalam pemanfaatan data kependudukan untuk layanan public

Selanjutnya Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk dengan sasaran stratgis: Persentase Data Penduduk Yang akurat	Kurang update data perkembangan penduduk	Dengan adanya kerjasama dengan lintas sector/ OPD seperti PN, Kejaksaan, KUA melalui inovasi SIPAK Integrasi sehingga untuk perkembangan/ perubahan elemen data penduduk dapat terupdate	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan datanya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil penjaringan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata

kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). di bawah ini menunjukkan daftar permasalahan dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Blitar.

Tabel 3.5 Isu Strategis Kota Blitar		
Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Ekonomi	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perpajakan perlu perbaikan
		Perlu penataan PKL
		Dampak Negatif perkembangan kota
	Kondisi Infrastruktur Kota	kondisi Infrastruktur perlu ditingkatkan
	Pengembangan ekonomi Lokal	Pengembangan ekonomi belum maksimal
	Penurunan angka pengangguran	Penurunan angka pengangguran belum maksimal
Lingkungan	Kondisi Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan masih tinggi
		Perubahan Iklim
		Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
		Penurunan kuantitas sumberdaya air
		Ruang Terbuka Hijau Terbatas
		Belum tertatanya kawasan permukiman
		Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
		Daya dukung lingkungan menurun
	Bencana (Alam dan Non Alam)	Bencana
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
Sosial	Alih Fungsi Lahan	Alih Fungsi Lahan Pertanian
	Kemiskinan	Kemiskinan
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan
		Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah
	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Perlunya Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan yang Adil dan Merata
		Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Keterkaitan isu strategis KLHS RPJMD dengan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan dibidang kependudukan dan pencatatn sipil masuk dalam pilar tata kelola pada kelompok isu strategis reformasi birokrasi. Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Sasaran KLHS	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan KLHS	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kelahiran yang dialami	Adanya inovasi “PECEL BLITAR” Pelayanan Cepat Langsung , Bayi Lahir Ibu Terima Akta Lahir. Kerjasama antara Dukcapil dengan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran	Belum semua fasilitas keshatan / rumah sakit yang ada di Kota Blitar memanfaatkan inovasi “PECEL BLITAR”
a.	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil			
b.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang .

Mengacu pada serangkaian telaahan keterkaitan terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidupm Strategis serta kondisi organisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat ditentukan rumusan isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Isu strategis inilah yang akan dikedepankan dalam perencanaan 5 tahun mendatang sebagai upaya untuk :

1. Bisa memberikan pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat .
Berbagai upaya – upaya inovasi akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memberikan pelayan yang mudah bagi masyarakat. Sebagai implementasi dari amanat misi Walikota Bliitar yang ke lima yakni pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi. Dengan semboyan pelayanan yang membahagiakan masyarakat maka perlu untuk mengoptimalkan pelayanan online yang sudah ada agar pelayanan Adminduk online bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar. `
2. Peningkatan kepemilikan capaian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
Dalam hal ini khususnya untuk capaian dokumen kependudukan yang masih kurang yakni dokumen KIA serta dokumen Akta Kelahiran dari seluruh kelompok umur di Kota Blitar
3. Meningkatnya tata kelola arsip pencatatan sipil , mengingat arsip dokumen pencatatan sipil merupakan arsip yang sangat vital dan terus bertambah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga/OPD dalam pelayanan public. Yang mana pada saat ini
masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data kependudukan. Untuk itu maka perlu untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Data kependudukan yang update sesuai peristiwa / perkembangan penduduk. Dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga/ OPD yang berkaitan dengan jenis elemen data penduduk untuk melakukan pemadanan data, sehingga data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat sesuai dengan peristiwa perkembangan penduduk .

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan diacapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapi 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu -isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki

4.1.2 Sasaran.

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Publik dengan strategi Peningkatan kualitas sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menetapkan tujuan yaitu untuk menangani isu isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Jawa Timur. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1b
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 - 2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	TUJUAN : Meningkatny a kualitas pelayanan public	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudu kan dan pencatatan sipil	Nilai SKM adalah nilai dari hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public. Dalam hal ini survey yang dilakukan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil		(BAIK) 84	Baik (88,72)	84,50 (BAIK)	Baik (89,63)	
	SASARAN 1: Meningkatny a kepemilikan dokumen kependuudk an dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilika n dokumen pendaftara n penduduk	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Dokumen pendaftaran penduduk dimaksud dalam rumusan perhitungan adalah dokumen KK, KIA, KTP	$\frac{\sum \text{Persentase Kepemilikan Dokumen pendaftaran penduduk}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	94,8	95%	96,88%	96%	98%	* Sumber data DKB Semester I 2023 Dirjen Kependu dukan dan Pencatata n Sipil Kementri an Dalam Negeri

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pencatatan sipil merupakan proses pembuatan catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting di maksud meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen pencatatan sipil yang merupakan rumusa perhitungan adalah dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta prkawinan dan akta perceraian.	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil}}{4 \text{ dokumen}} \times 100$	97,0	95%	95,50%	96%	*95,68%	* Sumber data DKB Semester I 2023 Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
	SASARAN 2: Meningkatkan pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Perjanjian kerjasama (PKS) merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama – sama dengan prinsip saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah, yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan,	$\frac{\text{Jumlah OPD/ Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD/ Lembaga/ Badan Hukum}} \times 100\%$		51,7%	51,72%	58,6%	58,6%	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah sehingga sangat penting pemerintahan suatu wilayah. Adapun Elemen data tersebut antara lain : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Golongan darah=, Agama / Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat dan lain sebagainya.							
2	TUJUAN: Meningkatny a Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		85 (A)	86,72 (A)	85,85 (A)	86,81 (A)	
	SASARAN: Meningkatny a kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		85 (A)	86,72 (A)	85,85 (A)	86,81 (A)	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.							

Tabel. 4.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 - 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2022	2023	2024	2025	2026
1	TUJUAN : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM adalah nilai dari hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public. Dalam hal ini survey yang dilakukan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil		84 (BAIK)	84,50 (BAIK)	85 (BAIK)	85,50 (BAIK)	86 (BAIK)
	SASARAN 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependuudkan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pendaftaran penduduk}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$		95%	96%	97%	98%	99%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2022	2023	2024	2025	2026
			dimaksud dalam rumusan perhitungan adalah dokumen KK, KIA, KTP							
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pencatatan sipil merupakan proses pembuatan catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting dimaksud meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen pencatatan sipil yang merupakan rumusa perhitungan adalah dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil}}{4 \text{ dokumen}} \times 100$		95%	96%	97%	98%	99%
	SASARAN 2: Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Perjanjian kerjasama (PKS) merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama – sama dengan prinsip saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Pemanfaatan data kependudukan adalah besarnya persentase jumlah PKS pemanfaatan data adminduk yang dilakukan dengan perangkat daerah/Lembaga/badan hukum. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD/Lembaga/badan hukum}} \times 100\%$		51,7	58,6	65,5	72,4	79,3

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2022	2023	2024	2025	2026
			dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah, yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah sehingga sangat penting pemerintahan suatu wilayah. Adapun Elemen data tersebut antara lain : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Golongan darah=, Agama / Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat dan lain sebagainya.							
2	TUJUAN: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2022	2023	2024	2025	2026
	SASARAN: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan upaya yang lebih rinci dari tiap strategi. Pada saat yang sama, perumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
MISI 5 :	MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	Peningkatan kualitas system pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Peningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan 2. Peningkatan kualitas data kependudukan 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan administrasi kependudukan 4. Peningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

VISI :	Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
MISI 5 :	MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			berbasis Kinerja 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program , kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program , kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana table berikut .

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	85,35 (A)	85,85 (A)				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KOTA BLITAR
			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Hasil survey IKM layanan sekretariat di tahun berjalan	Nilai	83 (BAIK)	85 (BAIK)	5.157.603.124			SEKRETARIAT	
			<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	<i>Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%</i>	%	100	100	19.171.200	8	4.209.800	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Dokumen	8	8	4.259.800	10	4.879.200	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	10	10	4.911.600	1	8.848.750	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ZI	Jumlah dokumen ZI pada tahun yang bersagkutan	Dokumen	1	1	9.999.800	1	8.848.750	SEKRETARIAT	
			<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	<i>Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%</i>	%	100	100	3.354.919.046	100	3.462.963.421	SEKRETARIAT	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan pada tahun bersangkutan	Orang	29	29	3.353.343.546	54	3.461.414.721	SEKRETARIAT	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	1	1.575.500	1	1.548.700	SEKRETARIAT	
			<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	<i>Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%</i>	%	100	100	343.371.100	100	237.587.000	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	even	2	2	343.371.100	2	237.587.000	SEKRETARIAT	
				Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan	pulikasi	2	2		2		SEKRETARIAT	
				Jumlah boilboard sebagai sarana sosialisasi yang terpelihara		titik	13	13		26		SEKRETARIAT	
				Jumlah jenis publikasi media cetak		jenis	5	5		5		SEKRETARIAT	
				Jumlah peserta sosialisasi		orang	325	325		300		SEKRETARIAT	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
				Jumlah publikasi di media elektronik		kali	2	2		2		SEKRETARIAT	
			<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart</i>	<i>Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%</i>	%	100	100	601.480.530	100	719.248.671	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	11	11	12.820.200	11	12.810.200	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan gedung Kantor yang tersedia	Jumlah jenis Peralatan gedung Kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	1	1	85.966.000	4	188.303.384	SEKRETARIAT	
				Jumlah jenis Perlengkapan gedung Kantor yang tersedia	Jumlah jenis Perlengkapan gedung Kantor yang tersedia	Jenis	1	1		3		SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	26	26	13.235.200	26	13.094.200	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	Dos	353	353	46.134.000	674	61.914.500	SEKRETARIAT	
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	29	29		26		SEKRETARIAT	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
				Jumlah minuman tamu yang tersedia	Jumlah minuman tamu yang tersedia pada tahun bersangkutan	Dos	115	115		37		SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Cetakan	6	6	13.281.400	5	13.096.000	SEKRETARIAT	
				Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun bersangkutan	Lembar	500000	500000		1500		SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Bahan bacaan	2	2	6.120.000	24	7.230.000	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	Rapat	50	50	300.774.000	39	301.142.367	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang dikelola	Jumlah dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang dikelola pada tahun bersangkutan	Dokumen	325	325	123.149.730	325	121.658.020	SEKRETARIAT	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	%	100	100	596.803.733	100	349.154.575	SEKRETARIAT	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	1	1	1.000.000	1	79.000	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	Rekening	5	5	361.803.733	50	115.075.576	SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia pada tahun bersangkutan	orang	78	78	234.000.000	70	233.999.999	SEKRETARIAT	
			<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	<i>Jml l Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%</i>	%	100	100	241.857.515	100	428.349.300	SEKRETARIAT	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada tahun bersangkutan	Unit	3	3	92.368.050	3	88.917.300	SEKRETARIAT	
				Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	12	12		9		SEKRETARIAT	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	Unit	4	4	34.356.065	4	26.163.000	SEKRETARIAT	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara /terehab pada tahun bersangkutan	Unit	1	1	76.000.000	1	274.756.000	SEKRETARIAT	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Dsarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana pelengkap gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis sarana pelengkap gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	Unit	4	4	39.133.400	2	38.513.000	SEKRETARIAT	
	Meningkatnya kualitas pelayanan public			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan adminitrasi kependudukan	Hasil survey SKM di tahun berjalan	Nilai	86,66					BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Blitar
		2. Meningkatnya kepemilikandokumen kependudukan dan pencatatan sipil		1. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah persentase capaian kepemilikan dokumen pendafataran penduduk / 3 dokumen x 100%	%	94,8					BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
				2. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatn sipil / 4 dokumen x 100%	%	99,25						

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	(Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n-1 x 100%)	%	0,48	0,03	161.459.008	0	468.771.138	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	(Jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n dibagi jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n x 100 %) - (Jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n-1 dibagi jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n-1 x 100%)	%	0,48	2,55		0,5			
				3. Persentase penerbitan dokumen KK	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan permohonan KK x 100%	%	100	100		100			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KIA, KK)					120.536.008			BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
				- KTP	(Jumah Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	%	99,52	99,59		99,49	424.772.138		
				- KIA	(Jumah jumlah anak wajib KIA 0-16 tah yang memiliki KIA dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	%	79,7	84,8		91,14			
				-KK	(Jumlah permohonan KK yang masuk dibagi jumlah KK yang diterbitkan) x 100%	%	100	100		100			
			Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta pendataan penduduk rentan	Jumlah peserta pendataan penduduk rentan pada tahun bersangkutan	Orang	39	39	21.341.300		15.761.500	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen yang dikirim	Jumlah dokumen yang dikirim pada tahun bersangkutan	Dokumen	7000	7000	99.194.708		409.010.638	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Jumlah jenis cetakan yang tersedia	Jumlah jenis cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	4	4		8.842			
				Jumlah jenis peralatan perekaman KTP el yang terpelihara	Jumlah jenis peralatan perekaman KTP el yang terpelihara pada tahun	Jenis	3	3		4			
										3			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
					bersangkutan								
				Jumlah pelayanan keliling	Jumlah pelayanan keliling pada tahun bersangkutan	Pelayanan Keliling	50	50		50			
				Jumlah jenis ATK pelayanan KTP el yang tersedia	Jumlah jenis ATK pelayanan KTP el yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	7	7		7			
			Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	Jumlah jenis blanko yang tersedia / jumlah jenis blanko yang dibutuhkan x 100%	%	100	100	37.620.000	100	37.380.000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah formulir/blanko pendaftaran penduduk yang tersedia	Jumlah formulir/blanko pendaftaran penduduk yang tersedia pada tahun bersangkutan	Formulir	20000	20000	37.620.000	20.000	37.380.000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	(Jumlah kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah kecamatan / kelurahan se Kota Blitar) x 100%	%	100	100	3.303.000	100	6619000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di setiap kelurahan	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di setiap kelurahan pada tahun bersangkutan	Orang	50	50		50	6.619.000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
			2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n-1 dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n-1 x 100 %)	%	2,34	2,19	316.943.000	4,13	90.190.150	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	(Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %)	%	3,36	2,6		2,3			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
				3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Jumlah akte kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%	%	100	100					
				4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	(Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n- x 100%)	%	1,77	0,03		100			
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran, kematian, perkawinan , perceraian)					86.548.900			BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
				- Akte kelahiran	(Jumah wajib Akta lahir yang memiliki akte kelahiran dibagi wajib akta lahir) x 100%	%	97,02	97,68		98,91			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
				- Akte kematian	(Jumlah permohonan akta kelahiran yang masuk dibagi jumlahakta kelahiran yang diterbitkan) x 100%	%	100	100		100			
				- Akte perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	%	76,8	811,24		83,08			
				- Akte perceraian	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	%	74,39	79,59		79,15			
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen keabsahan yang dikirim	Jumlah dokumen keabsahan yang dikirim pada tahun bersangkutan	Dokumen	400	400	28.564.000	440		BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
				Jumlah peserta apat koordinasi pelayanan akta kelahiran kematian dengan kecamatan dan kelurahan	Jumlah peserta apat koordinasi pelayanan akta kelahiran kematian dengan kecamatan dan kelurahan pada tahun bersangkutan	Orang	34	34		34			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
				Jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan akta dengan KUA dan P3N Kecamatan	Jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan akta dengan KUA dan P3N Kecamatan pada tahun bersangkutan	Orang	120	120		120			
				jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan pencatatan sipi	jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan pencatatan sipi pada tahun bersangkutan	Orang	70	70		70	24.106.950		
			Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah data dokumen pencatatan sipil yang terkumpul	Jumlah data dokumen pencatatan sipil yang terkumpul pada tahun bersangkutan	Dokumen	4000	4000	35.939.900	3.750	36.323.200	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis formulir pencatatan sipil yang tersedia	Jumlah jenis formulir pencatatan sipil yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	9	9	32.045.000	9	29.760.000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan / jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang di rencanakan x 100%	%	100	100	182.423.800	100	203.677.200	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi bersama KUA dan modin se Kota Blitar	Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi bersama KUA dan modin se Kota Blitar pada tahun bersangkutan	Orang	30	30	4.932.000	30	4.932.000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
				Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pencatatan perkawinan bersama P3N	Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pencatatan perkawinan bersama P3N pada tahun bersangkutan	Orang	7	7		7	0		
			Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah alat komunikasi pendukung pelayanan keliling pencatatan sipil yang tersedia	Jumlah alat komunikasi pendukung pelayanan keliling pencatatan sipil yang tersedia pada tahun bersangkutan	Unit	0	3	58.622.000	2	92.028.000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
				Jumlah pelayanan keliling pencatatan sipil (sasaran usia diatas 18 tahun)	Jumlah pelayanan keliling pencatatan sipil (sasaran usia diatas 18 tahun) pada tahun bersangkutan	Pelayanan Keliling	48	48		51	0		
				Jumlah anggota tim lintas sektor yang terfasilitas	Jumlah anggota tim lintas sektor yang terfasilitas dalam tahun yang bersangkutan	Orang	58	58		116	0		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	jumlah peserta pencatatan perkawinan massal non muslim	jumlah peserta pencatatan perkawinan massal non muslim pada tahun bersangkutan	Orang	20	20	133.440.900	40	84.387.200	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
			Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan pencatatan sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan pencatatan sipil pada tahun bersangkutan	Orang	195	195	24.804.300	195	22.330.000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	(Jumlah petugas pelayanan yang dibina dibagi jumlah seluruh tenaga pelayanan) x 100%	%	0	100	47.970.300	1	162.159.300	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
			Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta pembinaan dan bimbingan teknis pencatatan sipil	Jumlah peserta pembinaan dan bimbingan teknis pencatatan sipil pada tahun bersangkutan	Orang	0	70	47.973.900	38	162.159.300	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
		3. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga/ badan hukum		Persentase jumlah Perangkat Daerah/lembaga/badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS dibagi jumlah OPD (29) x 100%	%	0,27	51,7				BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada tahun dikurangi Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada tahun (n-1)dibagi jumlah Jumlah elemen target yang dimutakhirkan. X 100%	%	NA	16	744.008.200	0,16	536.452.400	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	(Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan dibagi jumlah OPD yang diusulkan PKS) x 100%	%	100	100	5.100.000	100	5.100.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah peserta rapat PKS	Jumlah peserta rapat PKS pada tahun bersangkutan	Orang		40	5.100.000	40	5.100.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
				Jumlah PKS yang dievaluasi	Jumlah PKS yang dievaluasi pada tahun bersangkutan	PKS		13		30			
				Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan penyusunan PKS	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan penyusunan PKS pada tahun bersangkutan	OPD		3		4			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			<i>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan</i>	<i>Jumlah kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan / kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di rencanakan x 100%</i>	%	NA	100	266.564.200	100	82.572.400	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah aplikasi pengaduan yang ter update	Jumlah aplikasi pengaduan yang ter update pada tahun bersangkutan	Aplikasi	1	1	266.564.200	1	82.572.400	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
				Jumlah dokumen IKM yang tersedia	Jumlah dokumen IKM yang tersedia pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	1		1			
				Jumlah dokumen SPP yang dievaluasi	Jumlah dokumen SPP yang dievaluasi pada tahun bersangkutan	Dokumen	1 dok	1 dok		1			
				Jumlah SOP yang dievaluasi	Jumlah SOP yang dievaluasi pada tahun bersangkutan	SOP	34	34		34			
				Jumlah surveylance ISO	Jumlah surveylance ISO pada tahun bersangkutan	kali	1	1		0			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update</i>	<i>Jumilha Elemen data yang diupdate tahun n/ keseluruhan jumlah elemen data x 100%</i>	%	NA	100	472.344.000	100	448.780.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis peralatan Pengelolaan Informasi Adminsitration Kependudukan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan Pengelolaan Informasi Adminsitration Kependudukan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Unit	8	8	472.344.000	0	448.780.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
				Jumlah Jenis Update Perkembangan Data Kependudukan	Jumlah Jenis Update Perkembangan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Unit	2	2		2			
				Jumlah peserta Rapat Teknis Operator SIAK dan SIPAK	Jumlah peserta Rapat Teknis Operator SIAK dan SIPAK pada tahun bersangkutan	Orang	100	100		100			
				Jumlah peserta mionev implmentasi aplikasi SIPAK DAN SIAK	Jumlah peserta mionev implmentasi aplikasi SIPAK DAN SIAK pada tahun bersangkutan	Orang	40	40		40			
				Jumlah rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun bersangkutan	Orang	40	40		40			
				Jumlah peserta rapat pepadanan data /informasi	Jumlah peserta rapat pepadanan data /informasi pada tahun bersangkutan	Orang	200	200		200			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
			2. PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	Jumlah Buku Profil yang tersedia / Jumlah Buku profil yang Harus disajikan x 100%	%	100	100	84.980.000	100	84.400.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			<i>Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan</i>	<i>Jumlah Buku Profil yang diterbitkan sesuai standart/ Jumlah Buku profil yang Harus diterbitkan dan sesuai standart x 100%</i>	%	100	100	84.980.000	100	84.400.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan pada tahun bersangkutan	Buku	200	200	84.980.000	200	84.400.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

Tabel. 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	Hasil survey IKM	indeks	86 (BAIK)	5.203.901.558	DISPENDUK CAPIL	Kota Blitar
2	12	'01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	9.912.630	SEKRETARIAT	Kota Blitar
2	12	01	201	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	11	4.755.450	SEKRETARIAT	
2	12	01	201	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Laporan	9	5.157.180	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	3.642.329.520	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	Orang	28	3.640.675.320	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	01	2.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	1	1.654.200	SEKRETARIAT	
2	12	01	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	100	62.762.700	SEKRETARIAT	
2	12	01	205	0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun bersangkutan	Paket	2	25.029.120	SEKRETARIAT	
2	12	01	205	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun bersangkutan	Orang	38	62.762.700	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	100	575.379.768	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	1	13.461.000	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	01	206	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	40.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	3	13.896.900	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	159.347.012	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	13.945.500	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Dokumen	24	6.426.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat oordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	30	205.153.356	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	123.150.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	%	100	145.000.000	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	1	35.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	1		SEKRETARIAT	
2	12	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	unit	36	50.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	60.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	%	100	438.393.900	SEKRETARIAT	
2	12	01	208	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Laporan	48	379.893.900	SEKRETARIAT	
2	12	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Laporan	13	58.500.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml l Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	330.123.040	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	13	101.842.900	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam tahun bersangkutan	Unit	1	10.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	4	27.121.400	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tetap Lainnya yang Dipelihara dalam tahun bersangkutan	Unit	1	41.158.740	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	1	150.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	(Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n-1 x 100%)	Unit	0,03	410.645.089	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
						2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n x 100 %) - (Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n-1 dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n-1 x 100%)		2,55			
						3. Persentase penerbitan dokumen KK	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan permohonan KK x 100%		100			
2	12	02	1.01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PPersentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)	Jumah Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%		99,62	348.969.089	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA)	(Jumah jumlah anak wajib KIA 0-16 tah yang memiliki KIA dibagi jumlah wajib KIA) x 100%		87,35			
						Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)	(Jumlah permohonan KK yang masuk dibagi jumlah KK yang diterbitkan) x 100%		100			
2	12	02	201	0001	Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan		1	22.408.365	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	02	201	0002	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan		32300	326.560.724	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	202		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	Jumlah jenis blanko yang tersedia / jumlah jenis blanko yang dibutuhkan x 100%		100	50.000.000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	202	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan		1	50.000.000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	204		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	(Jumlah kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah kecamatan / kelurahan se Kota Blitar) x 100%		100	11.676.000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	204	0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan		1	11.676.000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di t n dibagi jumlah pasangan menikah pada t n x 100 %) - (Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di t n-1 dibagi jumlah pasangan menikah pada t n-1 x 10	%	2,19	403.092.700	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
						2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	(Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %)	%	2,6			
						3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Jumlah akte kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%	%	100			
						4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	(Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n- x 100%)	%	0,30			
2	12	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran,)	(Jumah wajib Akta lahir yang memiliki akte kelahiran dibagi wajib akta lahir) x 100%	%	98,01	65.041.260	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kematian)	(Jumlah permohonan akta kemagian yang masuk dibagi jumlahakte kematian yang diterbitkan) x 100%	%	100			
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perkawinan)	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	%	83,43			

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perceraian	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	%	82,19			
2	12	03	201	0001	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	dokumen	5400	35.824.980	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	201	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	dokumen	1	29.216.280	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatn sipil yang dilaksanakan / jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatn sipil yang di rencanakan x 100%	%	100	199.151.440	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	202	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam pada tahun bersangkutan	laporan	1	13.832.780	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	03	202	0004	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	laporan	1	67.385.880	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	202	0006	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	laporan	1	92.100.000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	202	0008	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	25.832.780	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	(Jumlah petugas pelayanan yang dibina dibagi jumlah seluruh tenaga pelayanan) x 100%	%	100	138.900.000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	203	0004	Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	Laporan	1	138.900.000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada th n dikurangi Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada tahun (n-1)dibagi jumlah Jumlah elemen target yang dimutakhirkan. X 100%	%	16	800.742.510	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	201		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	(Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan dibagi jumlah OPD yang diusulkan PKS) x 100%	%	100	255.811.690	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	04	201	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	249.615.690	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	201	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Dokumen	3	6.196.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	202		Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan / kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di rencanakan x 100%	%	100	293.887.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	202	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	293.887.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	203		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	Jumlha Elemen data yang diupdate tahun n/ keseluruhan jumlah elemen data x 100%	%	100	142.000.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	203	0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	69.000.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Kerangka pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
									2023			
									K	Rp.		
2	12	04	203	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	Laporan	1	73.000.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	03	204		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	<i>(Jumlah operator SIAK yang dibina dibagi jumlah seluruh operator SIAK) x 100%</i>	%	100	109.043.820	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	03	204	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	Laporan	1	58.079.086	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	03	204	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Laporan	1	50.964.734	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	05			PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	Jumlah Buku Profil yang tersedia / Jumlah Buku profil yang Harus disajikan x 100%		100	89.229.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	05	201		<i>Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan</i>	<i>Jumlah Buku Profil yang diterbitkan sesuai standart/ Jumlah Buku profil yang Harus diterbitkan dan sesuai standart x 100%</i>		100	89.229.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	05	201	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain pada tahun bersangkutan		200	89.229.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

Tabel 6.3
Rencana Program , Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	Hasil survey IKM	Indeks	87 (BAIK)	10.772.620.345	88 (BAIK)	5.746.971.612	89 (BAIK)	5.918.311.289	89 (BAIK)	32.799.407.928	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Blitar
2	12	'01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	Persen tase	100	5.391.514.342	100	10.928.674	100	11.475.100	100	42.724.743	SEKRETARIAT	
2	12	01	201	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Doku men	11	10.408.339	11	10.928.674	11	11.475.100	44	20.496.733	SEKRETARIAT	
2	12	01	201	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	Lapor an	9	4.993.300	9	5.242.883	9	5.505.100	36	22.228.010	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	Persentase	100	3.824.445.986	100	4.014.844.540	100	4.216.451.800	100	15.698.071.846	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	Orang	27	3.822.709.086	27	4.013.844.540	27	4.214.536.800	108	15.691.765.746	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	1	1.736.900	1	1.000.000	1	1.915.000	4	6.306.100	SEKRETARIAT	
2	12	01	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	Persentase	100	65.900.835	100	66.000.000	100	76.288.454	100	270.951.989	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	01	205	0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun bersangkutan	Paket	2	25.029.120	2	25.029.120	2	25.029.120	8	100.116.480	SEKRETARIAT	
2	12	01	205	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun bersangkutan	Orang	38	65.900.835	38	66.000.000	38	76.288.454	38	270.951.989	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	Persen tase	100	594.741.294	100	780.304.529	100	755.219.779	100	2.705.645.370	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	1	14.134.100	1	14.840.800	1	15.582.800	4	58.018.700	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	41.000.000	2	42.000.000	2	43.000.000	8	166.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	3	14.591.800	3	15.321.390	3	16.087.500	12	59.897.590	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	01	206	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	165.062.171	2	173.315.279	2	181.981.043	8	679.705.505	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	14.642.800	2	15.374.900	2	16.143.700	8	60.106.900	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Dokumen	24	6.747.300	24	7.084.600	24	7.438.800	96	27.696.700	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat oordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	30	215.413.123	30	256.183.780	30	237.492.968	120	914.243.227	SEKRETARIAT	
2	12	01	206	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	123.150.000	1	256.183.780	1	237.492.968	1	739.976.748	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir perionde Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	Persen tase	100,00	170.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	560.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit			1	400.000.000	-		1	435.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	60.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	4	85.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Jumla h	3	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	48	200.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	Persen tase	100	457.388.600	100	477.333.069	100	446.937.356	100	1.820.052.925	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir perionde Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	01	208	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapor an	48	398.888.600	48	418.833.069	48	388.437.356	48	1.586.052.925	SEKRETARIAT	
2	12	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapor an	13	58.500.000	13	58.500.000	13	58.500.000	52	234.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml l Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	Persen tase	100	268.629.288	100	277.560.800	100	286.938.800	100	1.163.251.928	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	13	106.935.088	13	112.281.800	13	117.895.900	52	420.055.600	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam tahun bersangkutan	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	SEKRETARIAT	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir perionde Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	4	28.477.500	4	29.901.400	4	31.396.500	16	116.896.800	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah asset Tetap Lainnya yang Dipelihara dalam tahun bersangkutan	Unit	1	813.600	1	813.600	1	813.600	4	3.262.880	SEKRETARIAT	
2	12	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	390.000.000	SEKRETARIAT	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	(Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n-1 x 100%)	Perse ntase	0,03	431.177.344	0,03	450.475.522	0,03	470.738.328	0,18	1.924.495.362	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n x 100 %) - (Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n-1 dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n-1 x 100%)	Perse ntase	2,55		2,55		2,55		12,75			
						3. Persentase penerbitan dokumen KK	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan permohonan KK x 100%	Perse ntase	100		100		100		100			
2	12	02	201		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PPersentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)	Jumah Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	Perse ntase	99,65	366.417.543	99,68	382.477.732	99,71	399.340.528	99,71	1.497.204.892	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA)	(Jumah jumlah anak wajib KIA 0-16 tah yang memiliki KIA dibagi jumlah wajib KIA) x 100%	Perse ntase	88,90		92,45		95		95			
						Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan permohonan KK x 100%	Perse ntase	100		100		100		100			
2	12	02	201	0001	Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	Doku men	1	23.528.783	1	24.705.222	1	25.940.078	4	96.582.449	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	02	201	0002	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	Doku men	32300	342.888.760	32300	357.772.510	32300	373.400.450	129200	1.400.622.444	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	202		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	Jumlah jenis blanko yang tersedia / jumlah jenis blanko yang dibutuhkan x 100%	Perse ntase	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	215.506.250	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	202	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	Doku men	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	4	215.506.250	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	2.04		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	(Jumlah kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah kecamatan / kelurahan se Kota Blitar) x 100%	Perse ntase	100	12.259.800	100	12.872.790	100	13.516.550	100	50.325.140	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	204	0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	12.259.800	1	12.872.790	1	13.516.550	100	50.325.140	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n-1 dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n-1 x 10	Perse ntase	2,19	356.698.980	2,19	619.708.920	2,19	438.748.101	10,95	2.135.191.701	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
						2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	(Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %)	Perse ntase	2,6		2,6		2,6		13			
						3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Jumlah akte kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%	Perse ntase	100		100		100		100			
						4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	(Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n- x 100%)	Perse ntase	0,3		0,3		0,3		1,5			

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran,)	(Jumah wajib Akta lahir yang memiliki akte kelahiran dibagi wajib akta lahir) x 100%	Persen tase	98,34	56.044.486	98,67	75.488.672	99	72.710.314	99	269.284.732	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kematian)	(Jumlah akte kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan) x 100%	Perse ntase	100		100		100					
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perkawinan)	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	Perse ntase	85,62		87,81		90		100			
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perceraian	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	Perse ntase	84,79		87,39		89,99		90			
2	12	03	201	0001	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	Doku men	5400	31.491.811	5400	41.387.387	5400	45.641.014	89,99	178.655.565	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	201	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	Doku men	1	24.552.675	1	34.101.285	1	27.069.300	4	114.939.540	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir perionde Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan / jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang di rencanakan x 100%	Perse ntase	100	227.842.624	100	248.620.248	100	262.387.743	100	938.002.055	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	202	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	8.400.000	1	17.140.985	1	20.182.293	4	59.556.058	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	202	0004	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait PencatatanSipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	64.630.755	1	76.183.278	1	71.255.407	4	279.455.320	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	03	202	0006	Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	123.311.869	1	122.220.985	1	125.300.000	4	462.932.854	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	202	0008	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Lapor an	1	31.500.000	1	33.075.000	1	45.650.043	4	136.057.823	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	(Jumlah petugas pelayanan yang dibina dibagi jumlah seluruh tenaga pelayanan) x 100%	Perse ntase	100	72.811.870	100	295.600.000	100	103.650.044	100	610.961.914	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	203	0004	Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	72.811.870	1	295.600.000	1	103.650.044	100	610.961.914	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada th n dikurangi Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada tahun (n-1)dibagi jumlah Jumlah elemen target yang dimutakhirkan. X 100%	Perse ntase	16	873.235.031	16	916.896.792	16	961.689.982	80	4.296.572.515	BIDANG PIK DAN PEMANFAATAN DATA	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir perionde Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	04	201		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	(Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan dibagi jumlah OPD yang diusulkan PKS) x 100%	Persen tase	100	256.196.000	100	267.536.000	100	273.000.000	100	1.052.543.690	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	201	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yangDiolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan pada tahun bersangkutan	Doku men	1	250.000.000	1	260.000.000	1	264.000.000	4	1.023.615.690	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	201	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Doku men	3	6.196.000	3	7.536.000	3	9.000.000	12	28.928.000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	202		Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan / kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di rencanakan x 100%	Perse ntase	100	294.000.000	100	295.000.000	100	350.000.000	100	1232887000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	04	202	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun pada tahun bersangkutan	Doku men	1	294.000.000	1	295.000.000	1	350.000.000	4	1232887000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	203		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	Jumlha Elemen data yang diupdate tahun n/ keseluruhan jumlah elemen data x 100%	Perse ntase	100	212.000.000	100	214.896.792	100	226.000.000	100	794896792	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	203	0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lapor an	1	70.000.000	1	71.896.792	1	76.000.000	4	286896792	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	04	203	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	142.000.000	1	143.000.000	1	150.000.000	4	508000000	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	03	204		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	<i>(Jumlah operator SIAK yang dibina dibagi jumlah seluruh operator SIAK) x 100%</i>	Perse ntase	100	111.039.031	100	139.464.000	100	112.689.982	100	472236833	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	03	204	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	60.074.297	1	78.500.000	1	60.689.982	4	257343365	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	03	204	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	50.964.734	1	60.964.000	1	52.000.000	4	214893468	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	05			PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	Jumlah Buku Profil yang tersedia / Jumlah Buku profil yang Harus disajikan x 100%	Perse ntase	100	93.690.450	100	98.374.900	100	103.293.700	100	469.568.050	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renastra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	12	05	201		Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan sesuai standart/ Jumlah Buku profil yang Harus diterbitkan dan sesuai standart x 100%	Perse ntase	100	93.690.450	100	98.374.900	100	103.293.700	100	384.588.050	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
2	12	05	201	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain pada tahun bersangkutan	Doku men	200	93.690.450	200	98.374.900	200	103.293.700	800	384.588.050	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Adapun Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Dispendukcapil Kota Blitar Tahun 2022 – 2023 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	84 (BAIK)	84,50 (BAIK)
		SASARAN 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	95%	96%
			Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	95%	96%
		SASARAN 2: Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	51,7	58,6
		Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,85 (A)
		SASARAN: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,85 (A)

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Dispendukcapil Kota Blitar Tahun 2024 – 2026 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
A	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Survey Kepuasan Masyarakat	85 (BAIK)	85,50 (BAIK)	86 (BAIK)
		SASARAN 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependuudkan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	97%	98%	99%
			Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil			
		SASARAN 2: Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	65,5	72,4	79,3
		Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)
		SASARAN: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

Tabel. 7.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022- 2026

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026
1	SASARAN 1: Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pendaftaran penduduk}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	95%	96%	97%	98%	99%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil}}{4 \text{ dokumen}} \times 100$	95%	96%	97%	98%	99%
2	SASARAN 2: Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD/Lembaga/Badan Hukum}} \times 100\%$	51,7	58,6	65,5	72,4	79,3
3	SASARAN 3: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

Tabel. 7.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022- 2026

No	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Perekaman KTP Elektronik	100	100	100	100	100
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	82,77	85,32	87,87	90,42	92,97
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	95,76	96,09	96,42	96,75	97,08
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	2	2	2	2	2

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar maka dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Untuk itu agar melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.